

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2021/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SEPTIAN HARIO SETO
2. Jabatan : DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN
3. NHK : 802999

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 7.447.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 173 m2/200 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 238 m2/185 m2 di KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 5.200.000.000
3. Tanah Seluas 583 m2 di NGAWI, HASIL SENDIRI Rp. 147.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.610.000.000

1. MOBIL, TOYOTA VOXY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. MOBIL, BMW BMW 330I Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
3. MOBIL, HONDA CIVIC SPORT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 180.000.000**D. SURAT BERTAHAGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 338.123.443**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 9.575.123.443**III. HUTANG** Rp. 4.417.550.080**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 5.157.573.363

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.